

TESIS

**URGENSI PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) DAN POSISI PELAKU
USAHA PADA RANTAI DISTRIBUSI LANJUTAN**



Oleh

YULA

NIM. 2320215320006

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**URGENSI PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) DAN POSISI PELAKU
USAHA PADA RANTAI DISTRIBUSI LANJUTAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

YULA

NIM. 2320215320006

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

Judul Tesis : Urgensi Penganturan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) dan Posisi Pelaku Usaha pada Rantai Distribusi Lanjutan
Nama : Yula
NIM : 2320215320006

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1 003

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

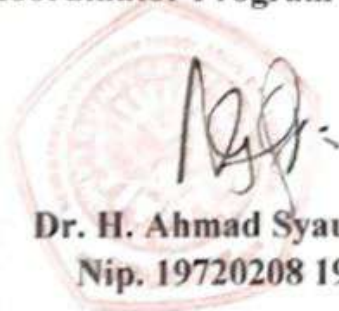
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 12 Desember 2025**

Pembimbing



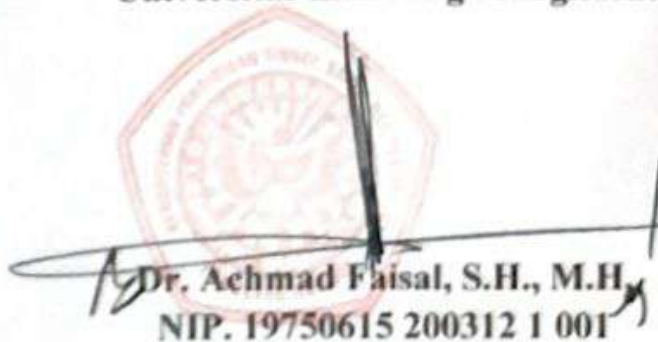
**Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Nip. 19760919 200212 1 003**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Nip. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 12 Desember 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

MOTTO/PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya. Dengan izin dan pertolongan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sebagai bagian dari proses akademik dalam Program Magister Hukum.

Tesis ini peneliti persembahkan pertama-tama kepada Allah SWT, sebagai yang maha mengetahui. Tesis ini juga didedikasikan kepada orang tua tercinta, Ajun dan Suri, atas segala doa, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tulus sepanjang hidup; kepada adik tersayang Eva, Epi, Nor Jannah, yang selalu memberikan kekuatan; kepada kekasih tercinta Zulfanu Hadi, yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta dukungan dalam segala bentuk; kepada para dosen pembimbing serta seluruh pengajar yang telah berbagi ilmu, arahan, dan keteladanan selama proses akademik; kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah kebersamai dan memberikan semangat; serta kepada Universitas Lambung Mangkurat, sebagai tempat peneliti menuntut ilmu dan integritas.

Menurut Albert Einstein "*Semua orang adalah jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ikan itu akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan meyakini bahwa ia bodoh.*" Dari kalimat tersebut prinsip hidup peneliti meyakini bahwa: "*Ketahui nilai dirimu, jangan biarkan penilaian orang lain mempengaruhimu.*"

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yula
NIM : 2320215320006
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Usulan Penelitian Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 17 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Yula

NIM. 2320215320006

YULA, 2025. URGENSI PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) DAN POSISI PELAKU USAHA PADA RANTAI DISTRIBUSI LANJUTAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. 118 Halaman

RINGKASAN

Tesis ini mengkaji problematika pengaturan hukum perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*), khususnya ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur posisi pelaku usaha pada rantai distribusi lanjutan. Fenomena *thrifting* berkembang pesat sebagai bagian dari dinamika ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Peningkatan minat terhadap *thrifting* disebabkan oleh harga yang terjangkau, ragam produk yang menarik, serta meningkatnya kecenderungan masyarakat terhadap konsumsi berkelanjutan. Namun, popularitas fenomena ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang secara tegas melarang impor pakaian bekas melalui berbagai regulasi, seperti UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Permendag No. 40 Tahun 2022, Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015, UU Perlindungan Konsumen dan UU Pengelolaan Sampah, yang memasukkan pakaian bekas dalam daftar barang yang dilarang impor dan dilarang peredarannya. Meskipun secara normatif larangan tersebut telah memperoleh dasar hukum yang kuat, praktik perdagangan pakaian bekas impor tetap marak dan berlangsung secara meluas. Pakaian bekas impor masuk melalui jalur ilegal, dipasarkan dalam bentuk *balpress*, dan kemudian menyebar ke berbagai daerah melalui mata rantai distribusi yang kompleks, mulai dari importir ilegal, distributor utama, pengecer besar, hingga pedagang kecil pada rantai distribusi lanjutan. Para pelaku usaha pada tingkat lanjutan inilah yang kemudian menjadi fokus permasalahan tesis ini. Mereka pada umumnya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan impor ilegal, melainkan membeli barang dari pasar domestik yang sudah beredar secara luas. Namun, karena sifat objek yang mereka perjualbelikan merupakan barang yang dilarang beredar, kedudukan hukum mereka menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan struktural antara norma hukum dengan realitas sosial. Regulasi yang ada hanya menitikberatkan pada pelarangan impor, tetapi tidak mengatur secara komprehensif bagaimana status hukum pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas setelah barang tersebut berada di dalam negeri. Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakpastian, baik bagi penegak hukum maupun bagi pelaku usaha sendiri. Aparat sering kali menafsirkan keterlibatan pedagang kecil sebagai bagian dari tindak pidana penyelundupan,

sehingga terjadi risiko overkriminalisasi. Di sisi lain, pedagang kecil yang menggantungkan pendapatan pada penjualan *thrifting* tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Tesis ini mendasarkan analisisnya pada tiga teori utama: teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori negara kesejahteraan.. Dalam konteks *thrifting*, kepastian hukum menjadi penting karena tanpa adanya norma yang jelas mengenai kedudukan pelaku usaha lanjutan, hukum positif berpotensi diterapkan secara tidak tepat sasaran. Pelaku utama impor ilegal dan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki keterlibatan langsung tidak dibedakan secara yuridis, sehingga berpotensi melanggar asas kesalahan dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Sementara itu, teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan moral bagi masyarakat. Larangan impor pakaian bekas memang dimaksudkan untuk melindungi industri tekstil nasional, kesehatan masyarakat, dan lingkungan hidup. Namun, ketika penerapannya tidak disertai pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan sosial ekonomi, hukum justru berpotensi merugikan pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghidupan pada perdagangan *thrift*. Oleh sebab itu, pembentukan norma yang lebih komprehensif diperlukan agar hukum tidak hanya bersifat represif (menghukum), tetapi juga solutif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Teori negara kesejahteraan melengkapi analisis tersebut dengan menegaskan bahwa negara tidak hanya bertugas menegakkan ketertiban, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara, terutama kelompok ekonomi kecil. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor, negara harus mampu menghadirkan kebijakan hukum yang melindungi masyarakat kecil dari kriminalisasi yang tidak proporsional tanpa mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. Konsep ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk membuat regulasi yang lebih adil dan progresif, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi terkait perdagangan, kepabeanaan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan lingkungan hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur kedudukan, kewajiban, maupun pertanggungjawaban pelaku usaha pada rantai distribusi lanjutan. Ketiadaan norma ini mengakibatkan ambiguitas penegakan hukum dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Berdasarkan analisis tersebut, tesis ini menawarkan model pengaturan hukum yang ideal (*ius constituendum*). Pertama, pengaturan harus bersifat integratif, menggabungkan aspek perdagangan, kesehatan, kepabeanaan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup ke dalam satu regulasi komprehensif. Kedua, harus ada klasifikasi yang jelas antara importir ilegal sebagai pelaku utama kejahatan dan pelaku usaha lanjutan yang tidak terlibat dalam proses impor. Pelaku usaha lanjutan semestinya diposisikan sebagai

pedagang domestik yang tunduk pada ketentuan perlindungan konsumen, bukan sebagai bagian dari penyelundupan. Ketiga, perlu dibentuk regulasi khusus, seperti revisi Permendag No. 40/2022 atau penyusunan peraturan baru mengenai perdagangan barang bekas impor, yang mengatur mekanisme perizinan, pembinaan, dan pengawasan secara proporsional.

Dengan demikian, tesis ini menegaskan bahwa pengaturan hukum yang ideal harus menciptakan keseimbangan antara perlindungan industri nasional, upaya pencegahan masuknya barang berbahaya, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Kehadiran norma baru diharapkan mampu mengatasi kekosongan hukum, mengurangi risiko overkriminalisasi, dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

YULA. 2025. Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) dan Posisi Pelaku Usaha pada Rantai Distribusi Lanjutan. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjan, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. 118 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : *Thrifting*, pakaian bekas impor, pelaku usaha lanjutan, kepastian hukum, *ius constituendum*, perdagangan, regulasi.

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) di Indonesia serta kedudukan pelaku usaha pada rantai distribusi lanjutan dalam perspektif hukum positif. Meskipun impor pakaian bekas secara tegas dilarang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Kepabeanan, serta Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015, fenomena *thrifting* tetap berkembang pesat dan membentuk jaringan distribusi domestik yang kompleks. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dengan realitas sosial, khususnya terkait kekosongan aturan mengenai status dan pertanggungjawaban pelaku usaha lanjutan yang tidak terlibat langsung dalam proses impor.

Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada masih parsial dan belum secara eksplisit mengatur kedudukan pelaku usaha lanjutan. Kekosongan norma tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, risiko overkriminalisasi, serta ketidakefektifan penegakan hukum yang cenderung menysasar pedagang kecil alih-alih importir ilegal sebagai pelaku utama. Analisis teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan konsep negara kesejahteraan menunjukkan perlunya pembentukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini menawarkan model pengaturan ideal (*ius constituendum*) yang meliputi penguatan integrasi regulasi antarsektor, penegasan klasifikasi antara importir ilegal dan pelaku usaha lanjutan, serta pembentukan regulasi khusus terkait perdagangan barang bekas impor. Model tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, serta mendukung terciptanya tata kelola perdagangan yang lebih responsif dan proporsional terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat.

YULA. 2025. *The Urgency of Legal Regulation of Imported Second-hand Clothing Trade (Thrifting) and the Position of Business Actors in the Downstream Distribution Chain.* Master of Law Programme, Faculty of Law, Postgraduate Programme, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. 118 Pages

ABSTRACT

Keywords: Thrifting, imported second-hand clothing, downstream businesses, legal certainty, ius constituendum, trade, regulation.

This study examines the legal regulations governing the trade of imported second-hand clothing (thrifting) in Indonesia and the position of business actors in the downstream distribution chain from a positive law perspective. Although the import of second-hand clothing is expressly prohibited by Law No. 7 of 2014 on Trade, the Customs Law, as well as Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022 and Minister of Trade Regulation No. 51/M-Dag/Per/7/2015, the phenomenon of thrifting continues to grow rapidly and has formed a complex domestic distribution network. This situation indicates a discrepancy between legal norms and social reality, particularly regarding the absence of regulations concerning the status and accountability of downstream businesses that are not directly involved in the import process.

Using normative legal research methods with a legislative, conceptual, and analytical approach, this study found that existing regulations are still partial and do not explicitly regulate the position of downstream businesses. This normative vacuum has resulted in legal uncertainty, the risk of over-criminalisation, and ineffective law enforcement that tends to target small traders rather than illegal importers as the main perpetrators. An analysis of legal certainty theory, utility theory, and the concept of the welfare state shows the need for the establishment of more comprehensive, adaptive, and equitable legal regulations.

The results of this study offer an ideal regulatory model (ius constituendum) that includes strengthening cross-sector regulatory integration, clarifying the classification between illegal importers and downstream businesses, and establishing specific regulations related to the trade of imported used goods. This model is expected to provide legal certainty, protect small businesses, and support the creation of trade governance that is more responsive and proportional to the socio-economic development of society.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “*Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Imor (Thrifting) dan Posisi Pelaku Usaha pada Rantai Distribusi Lanjutan*”.

Selama dalam rangka penyelesaian tesis ini, peneliti banyak memperoleh masukan berupa pengalaman, petunjuk-petunjuk, pengetahuan maupun ilmu yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perkenankanlah peneliti pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menjalani studi di Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan akademik yang sangat berarti bagi peneliti selama proses penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., atas arahan yang sangat berguna, serta dorongan yang memotivasi peneliti untuk terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta memaklumi keadaan peneliti, serta

kesabaran selama peneliti mengerjakan tesis ini. Bimbingan beliau sangat membantu peneliti untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu, wawasan, dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang perjalanan studi peneliti.
6. Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu dalam administrasi yang mendukung kelancaran studi peneliti.
7. Keluarga tercinta, terutama orang tua, nenek tersayang, dan adik-adik yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, nasihat, dan memberikan dukungan secara finansial untuk peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, baik secara pemikiran, motivasi, serta tempat tinggal. Tanpa adanya kalian, mungkin tesis ini masih belum selesai sampai sekarang.
9. Kekasih tercinta yang selalu mengusahakan meluangkan waktu untuk menemani peneliti ke Banjarmasin serta memberikan dukungan dan selalu menemani peneliti dalam membuat tesis ini, serta dukungan lain nya yang tidak dapat disebutkan, semoga akan selalu menemani dalam langkah-langkah selanjutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Harapan peneliti, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi perkembangan

ilmu pengetahuan, khusus nya dalam bidang hukum pidana, maupun sebagai kontribusi bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia, khusus nya dalam pengaturan mengenai perdagangan.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 17 Desember 2025

Hormat Peneliti,

Yula

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Rumusan Masalah..... 13
C.	Keaslian Penelitian 13
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian 17
E.	Tinjauan Pustaka..... 19
F.	Metode Penelitian 44
G.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan..... 56
BAB II	PENGATURAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (<i>THRIFTING</i>) DAN POSISI PELAKU USAHA PADA RANTAI DISTRIBUSI LANJUTAN
A.	Pengaturan Hukum Positif Perdagangan Pakaian Bekas Impor (<i>Thrifting</i>) di Indonesia..... 59

	B.	Posisi Pelaku Usaha dalam Rantai Perdagangan Pakaian Bekas Impor (<i>Thrifting</i>).....	74
	C.	Celah Hukum dalam Pertanggungjawaban.....	78
BAB III		KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM YANG IDEAL (<i>IUS CONTITUENDUM</i>) UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA PADA RANTAI DISTRIBUSI LANJUTAN	
	A.	Kedudukan Pelaku Pada Rantai Distribusi Lanjutan dalam Perspektif Hukum	89
	B.	Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pada Rantai Distribusi Lanjutan	95
	C.	Model Pengaturan Hukum yang Ideal Terhadap Kedudukan Hukum Pelaku Usaha Pada Rantai Distribusi Lanjutan	107
BAB IV		PENUTUP	
	A.	Simpulan	114
	B.	Saran	116
		DAFTAR PUSTAKA	
		DAFTAR RIWAYAT HIDUP	